

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN SISTEM PELAPORAN
TERHADAP AKUNTABILITAS SEKOLAH SMP DAN SMA
NEGERI KOTA SEMARANG
(Studi pada SMP dan SMA Negeri Kota Semarang)**

Elga Pratiwi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Dian Nuswantoro

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas sekolah SMP dan SMA Negeri Kota Semarang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi, dengan demikian maka untuk mendapatkan hasil yang lebih mutlak dalam penggunaan model regresi maka terlebih dahulu diadakan pengujian kualitas instrument pengamatan, uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Pengolahan data menggunakan *software* SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bukti bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja sekolah SMA dan SMP Negeri Kota Semarang.

Kata kunci : Partisipasi penyusunan anggaran, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja

ABSTRACT

This research tend to analyze the effect of participation in budget preparation and reporting system toward the accountability junior high school and senior high school in semarang. Methods of data analysis used in this research is regression model, and thus to obtain a more absolute result in the use of regression models testing the first place the quality of observational instruments, the normality test data and test the classical assumption. Processing data using Statistical Package For Social Science (SPSS) software. The result show evidence that participation in budget preparation and reporting system have a positive and significant relationship impact on accountability junior high school and senior high school in semarang.

Keywords : Participation of budgiting, reporting system and performance accountability

PENDAHULUAN

Sektor pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat selama dua dekade terakhir. Pada tahun 1998, tingkat anak mendaftar ke sekolah dasar mencapai lebih dari 90%. Namun, sektor ini juga diwarnai oleh tingginya angka anak putus sekolah dan rendahnya angka siswa yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Adanya krisis ekonomi turut memperparah kondisi ini, terutama bagi keluarga miskin (Bastian, 2006).

Menurut UNESCO, dari sisi kualitas pendidikan, Indonesia menduduki peringkat 12 negara Asia dan ASEAN. Hal ini ditandai dengan rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan di banyak sekolah dasar, ketimbang akses menuju pendidikan tingkat menengah, pengelolaan pendidikan yang tidak efisien, metode pengajaran yang sudah ketinggalan jaman, dan kurangnya peran serta orang tua dalam pendidikan anak-anaknya. Kondisi ini merupakan dampak dari pendekatan sentralistik, di mana pemerintah pusat menentukan kurikulum, ujian, prosedur kepegawaian, dan alokasi guru secara nasional ke sekolah di seluruh Indonesia. Di era desentralisasi seperti ini, pihak pemerintah kota/kabupatenlah yang menghadapi semua tantangan ini. Ironisnya, pengetahuan, kemampuan, dan kapasitas pejabat pemerintah daerah dalam menentukan perencanaan dan manajemen pendidikan masih perlu ditingkatkan (Bastian, 2006).

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan adanya Standart Nasional Pendidikan yang terdiri dari isi, standart proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standart Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidik, pengelolaan, pembayaran

pendidikan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pendidikan termasuk penyediaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem administrasi sekolah ataupun jenjang pendidikan.

Pendidikan di Indonesia terdiri dari tiga jenjang yakni Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan tinggi. Pada setiap jenjang pendidikan, masing-masing memiliki jenis kegiatan yang sama berupa penyelenggaraan sistem belajar dan mengajar yang didasarkan pada kurikulum pelajaran yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang pendidikan (Bastian, 2006).

Dalam organisasi dan lembaga pendidikan, menggunakan sistem akuntansi sebagai alat untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan entitas sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya serta penafsiran atas hasil-hasil dari aktivitas (sistem dan mekanisme penganggaran (*budgeting*)) yang dilakukan (Bastian, 2006).

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang harus diperhatikan oleh organisasi pada saat menyusun suatu perencanaan yang akan dibuat dan mampu merealisasikan rencana tersebut dengan baik. Dalam suatu organisasi, anggaran tersebut disusun untuk mengetahui atau membatasi biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, anggaran haruslah realistis, dapat dicapai, dan terdokumentasi dengan baik (Shim dan Siegel, 2001). Tahapan penyusunan anggaran menjadi sangatlah penting, karena suatu anggaran dapat memberikan peringatan akan adanya kemungkinan timbulnya masalah pada perencanaan yang telah disusun.

Dalam pasal 47 ayat 2 dinyatakan bahwa pendanaan dana pendidikan adalah sumber dana keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan meliputi dana yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dana berasal dari masyarakat. Dana yang berasal dari pemerintah biasanya berasal dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Sedangkan dana yang berasal dari masyarakat adalah dalam bentuk dana pendidikan dari orang tua peserta didik yang pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada yayasan. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), yang biasanya masuk dalam pos pendapatan hanya sumbangan pendidikan selama triwulan (DPP), bantuan APBD, SPP, uang gedung/uang pangkal, dan dana sukarela yang berasal dari orang tua siswa.

Proses anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak mengenai tujuan yang ingin dicapai sangatlah penting bagi kesuksesan anggaran. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Hal itu menyebabkan timbulnya berbagai masalah di antaranya kurangnya ketelitian dan minimnya pengetahuan dalam proses penyusunan anggaran. Kondisi inilah yang tampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006).

Selain itu, pemerintah juga merancang program yang dialokasikan di bidang pendidikan yang disebut dengan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini bertujuan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembelian buku-

buku referensi maupun buku pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan dan membiayai semua kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dan bertujuan untuk pengembangan sekolah maupun pengembangan pendidikan Sultoni (2011). Program dana BOS merupakan salah satu bagian dari program administrasi keuangan yang sangatlah penting bagi sebuah instansi. Oleh karena itu, administrasi ini memerlukan pengontrolan yang lebih besar. Jika terjadi penyalahgunaan dana atau pemakaian dana yang tidak semestinya, maka dampak yang ditimbulkan pada program administrasi atau kegiatan belajar mengajar cukup besar.

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM. Dari hal itu, betapa pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM agar sejajar dengan manusia lain, baik secara regional (otonomi daerah), nasional, maupun internasional (global). Tinggi rendahnya kualitas SDM antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dalam hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan maupun kelompok. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan sangat diperlukan guna memperbaiki kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, baik produk dan jasa maupun pelayanan yang mampu bersaing di lapangan kerja yang ada dan diperlukan. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Menurut Supriadi (1996), mengemukakan bahwa agar pendidikan dapat memainkan perannya, keterkaitan dengan dunia kerja harus difokuskan, artinya lulusan pendidikan harus memiliki kemampuan dan ketrampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Sedangkan menurut Kartadinata (1997) mengemukakan bahwa pengembangan SDM berkualitas

adalah proses kontekstual, sehingga pengembangan SDM melalui upaya pendidikan bukanlah sebatas menyiapkan manusia yang menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang cocok dengan dunia kerja pada saat ini, melainkan juga manusia yang mampu, mau dan siap belajar sepanjang hayat.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggung jawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan. Proses tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki wewenang (pemerintah, orang tua siswa dan guru) sesuai dengan penyusunan pelaporan yang dibuat. Selain itu, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran (Mardiasmo, 2002). Serta berkewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan dalam suatu organisasi atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran yang dijalankannya. Dengan adanya akuntabilitas tersebut, bagian administrasi dan pihak terkait lainnya akan menjalankan semua program yang sudah direncanakan sesuai dengan prosedur yang ada, serta melaporkan hasil yang sudah dicapai secara transparan kepada masyarakat dan mempertanggungjawabkannya. Karena dengan adanya akuntabilitas kepada pihak yang memiliki wewenang (pemerintah, orang tua murid dan masyarakat), mereka akan mengetahui secara jelas anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan oleh sekolah.

Dalam penilaian kinerja, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek tertentu saja, melainkan meliputi berbagai aspek yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi

kelayakan sekolah dan kinerja kepala sekolah tersebut. Kualitas proses pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kualitas proses penganggaran karena pengukuran kinerja berkaitan dengan proses penganggaran. Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting yang melibatkan berbagai pihak tertentu, baik kepala sekolah sebagai orang yang berperan penting maupun staf administratif yang masing-masing pihak memiliki peranan dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dan tujuan anggaran yang akan mereka susun.

Menurut Leslie (1992), anggaran yang dihasilkan senantiasa digunakan sebagai tolak ukur bagi kinerja manajer (kepala sekolah) dan para karyawan. Sedangkan menurut Govindarajan (1986), hubungan antara partisipasi anggaran terhadap prestasi kerja dan kepuasan kerja karyawan adalah tergantung pada faktor kondisi lingkungan tempat mereka berkerja. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dan sistem pelaporan diharapkan akan meningkatkan kinerja para kepala sekolah dan para karyawan lainnya. Serta dengan keterlibatan mereka dalam penyusunan anggaran dan sistem pelaporan, dapat mengetahui sejauh peningkatan kinerja yang sudah diharapkan.

Penelitian ini merupakan sintesa dari penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2011) dan Muhlis, Syarifuddin & Mediatty (2005). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2011) di Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi, variabel yang digunakan dalam penelitiannya adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan sebagai

variable independen dan akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen. Dan penelitian Muhlis, Syarifuddin dan Mediaty (2005) variable yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, variabel yang digunakan adalah partisipasi penyusunan anggaran, budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel independen dan kinerja manajerial sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian yang saya lakukan di SMA dan SMP Negeri Kota Semarang, variabel yang saya gunakan adalah partisipasi penyusunan anggaran dan sistem pelaporan sebagai variabel independen dan akuntabilitas kinerja sekolah sebagai variabel dependen.

Atas dasar latar belakang diatas, maka saya melakukan penelitian dengan topik “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Sekolah SMP dan SMA Negeri Kota Semarang“.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah yang bertugas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Semarang yang tersebar di 41 SMPN dan 16 SMAN di kota Semarang.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala sekolah yang bertugas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Semarang yang tersebar di 41 SMPN dan 16 SMAN di kota Semarang.

Pengumpulan Data dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode survey, semua populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan cara menyerahkan langsung kuesioner kepada responden dan memintanya kembali pada tanggal yang sudah dijanjikan oleh responden. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 57 orang yang terdiri dari kepala sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Semarang yang tersebar di 41 SMPN dan 16 SMAN di kota Semarang. Kemudian yang menjadi sampel adalah 50 orang yang terkait dalam partisipasi penyusunan anggaran dan sistem pelaporan di Kota Semarang yaitu kepala sekolah SMP N dan SMA N, dengan demikian total populasi yang menjadi sampel adalah 50 populasi.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan terlebih dahulu mengkonversikan skala ordinal ke skala interval melalui interval berurutan (*Method of successive interval*). Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi variable terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal apakah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribus data normal dan mendekati normal. Asumsi Multikolinearitas yaitu situasi adanya kolerasi variable-variabel bebas antara yang satu dengan yang lainnya. Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan uji T dan uji F :

Berikut ini adalah persamaan yang digunakan dalam penelitian :

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Sekolah

a = Koefisien Konstanta

b = Koefisien Variabel Independen

X₁ = Partisipasi Penyusunan Anggaran

X₂ = Sistem Pelaporan

E = Error Term

Definisi Operasional Variabel

Terdapat tiga variable yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Partisipasi Anggaran (X₁)

Partisipasi Anggaran merupakan variable dependen. Partisipasi penganggaran ini dideskripsikan sebagai persepsi atas seberapa jauh partisipasi yang dilakukan responden dalam penyusunan anggaran. Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Samuel (2008), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan:

1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.
3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.
4. Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
5. Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
6. Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

Keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran akan membuatnya memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval dengan skala likert sebagai skala ratingnya.

Pengukurannya jika responden memilih jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) bernilai 1, TS (Tidak Setuju) bernilai 2, N (Netral) bernilai 3, S (Setuju) bernilai 4, dan SS (Sangat Setuju) bernilai 5. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi skor yang diperoleh berarti semakin tinggi pula tingkat partisipasi manajer (kepala sekolah) dalam proses penyusunan anggaran.

2. Sistem Pelaporan (X₂)

Sistem pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa ada pencatatan dan pelaporan, kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan berjalan lancar. Setiap organisasi harus menyiapkan anggaran secara berkala, selalu memonitor kemajuan anggaran, mengidentifikasi bagian yang kurang mengalami kemajuan, laporan anggaran dapat digunakan untuk mengakumulasi informasi, perencanaan dan pengendalian serta laporan keuangan ini dapat mempertimbangkan evaluasi kinerja dengan membandingkan anggaran dengan yang aktual (Shim dan Siegel, 2001).

Jadi, data dan informasi merupakan sebuah unsur terpenting dalam sebuah organisasi, karena data dan informasi yang berbicara tentang keberhasilan atau perkembangan organisasi tersebut. Terdapat tiga unsur indikator pelaporan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil kerja atau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Skala pengukuran adalah bernilai satu sampai lima. Skor terendah adalah nilai satu yang menunjukkan kinerja yang rendah dan skor tertinggi menunjukkan kinerja yang tinggi.

3. Akuntabilitas Kinerja (Y)

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban,

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Terdapat lima unsur indikator akuntabilitas publik yang harus dipenuhi, diantaranya adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan. Skala pengukuran adalah bernilai satu sampai lima. Skor terendah adalah nilai satu yang menunjukkan kinerja yang rendah dan skor tertinggi menunjukkan kinerja yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan kuesioner yang telah kembali, diperoleh 50 buah kuesioner yang dapat diolah. Atas 50 kuesioner tersebut, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen-instrumen dalam kuesioner valid dan reliabel.

Pembahasan Hipotesis I

Pada hipotesis I dilakukan untuk melihat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja sekolah, dan hipotesis yang dikemukakan dalam hal ini adalah :

H1 : Semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran, semakin tinggi akuntabilitas kinerja sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja sekolah dengan nilai signifikansi, $0,022 < \alpha = 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,370 > t_{tabel} 1,462$. Nilai koefisiensi β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,532. Dari hasil ini dapat disimpulkan dengan adanya pengaruh positif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja sekolah menunjukkan bahwa

semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran, maka akan semakin meningkatkan kinerja sekolah yang ada di kota Semarang.

Dilihat dari statistik frekuensi variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran nilai yang paling tinggi yaitu pada indikator variabel $X_{1,1}$ yaitu sekolah memahami persis dalam merancang anggaran sekolah dengan nilai rata-rata 4,84. Indikator variabel $X_{1,3}$ yaitu sekolah memiliki sasaran yang jelas untuk mencapai tujuan dengan nilai rata-rata 4,7. Dan indikator variabel $X_{1,6}$ yaitu pemahaman mengenai pengelolaan anggaran yang akan dibuat.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran yang tinggi dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja sekolah. Karena partisipasi penyusunan anggaran adalah suatu kegiatan menyusun berbagai keputusan yang akan diambil mulai dari proses memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana serta proses pertanggungjawabannya. Selain itu, sekolah juga dituntut untuk dapat mengorganisasikan dengan menetapkan staf yang akan melaksanakan tugas pekerjaan, membagi tugas, dan menetapkan kedudukan, serta saling berkoordinasi satu dengan lainnya agar tidak terjadi perbedaan pendapat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dengan hal itu, staf yang sudah dipilih dan diberikan tanggungjawab untuk membantu mengelola keuangan sekolah dituntut untuk mampu memahami peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan administrasi keuangan, memahami pembukuan dan mampu bertanggungjawab terhadap tugasnya diharapkan mampu mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muhlis, Syarifuddin dan Mediaty (2005), yang meneliti tentang Pengaruh Partisipasi

Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Moderator (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Barru SUL-SEL). Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran, berpengaruh positif signifikan secara simultan maupun parsial terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pembahasan Hipotesis II

Hipotesis II dalam penelitian diungkapkan :

H2 : Semakin tinggi tingkat sistem pelaporan, semakin tinggi Akuntabilitas Kinerja Sekolah.

Hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja sekolah dengan nilai signifikansi $0,003 < \alpha = 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,144 > t_{tabel} 1,462$. Nilai koefisiensi β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 1,097. Dari hasil ini dapat disimpulkan dengan adanya pengaruh positif antara sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja sekolah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian sistem pelaporan, maka akan semakin meningkatkan kinerja sekolah yang ada di kota Semarang dalam sistem pelaporan anggaran.

Dilihat dari statistik frekuensi variabel Sistem Pelaporan nilai yang paling tinggi yaitu pada indikator variabel $X_{2,1}$ yaitu kewajiban sekolah dalam pembuatan laporan keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan yang terjadi dengan nilai rata-rata 4,82 dan Indikator variabel $X_{2,3}$ yaitu kejelasan dalam pencatatan penggunaan anggaran yang digunakan haruslah jelas dan rinci dengan nilai rata-rata 4,72.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sekolah wajib membuat dan melaporkan posisi keuangan yang terjadi disekolah secara transparan mulai dari jumlah dana yang diterima sampai dana itu

telah digunakan oleh sekolah harus dilaporkan secara rinci penggunaannya dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Selain itu, transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan dan kepercayaan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan yang ada disekolah.

Oleh karena itu, kepala sekolah harus selektif dalam menempatkan staf yang benar-benar ahli dalam mengelola pembukuan administrasi keuangan sekolah dan kepala sekolah dituntut untuk memahami peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan pengadministrasian uang negara serta mampu melakukan pengawasan terhadap proses pembuatan laporan keuangan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang diharapkan mampu mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber dana sekolah yang dipergunakan dan dicatat sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan sekolah.

Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Netty Herawaty (2011) tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota jambi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Sekolah.
2. Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Sekolah.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa :

1. Bagi sekolah : Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan partisipasi penyusunan anggaran dan sistem pelaporan sudah dilakukan dengan baik dan mempunyai efek positif yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja sekolah SMP dan SMA Negeri di Semarang. Demi menghindari kemungkinan penyimpangan yang terjadi, tiap-tiap sekolah harus lebih bersikap transparansi dan lebih selektif dalam pengambilan keputusan serta kepala sekolah dituntut untuk mampu memahami peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan pengadministrasian uang negara serta mampu melakukan pengawasan terhadap proses pembuatan laporan keuangan sekolah.
2. penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban kuesioner lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
3. Kuesioner sebaiknya diisi oleh orang-orang yang memang mengerti dan yang

memiliki tanggung jawab yang paling dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, M. Tatang. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Annisarahma.2008. *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri, Budget Emphasis dan Komitmen Organisasi terhadap Timbulnya Slack Anggaran*. Skripsi. UII. (dipublikasikan)
- Bangun,Andarias. 2009. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.(dipublikasikan)
- Bastian, indra. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Boy, deny dan Hotniar Siringoringo. 2009. *Analisis Pengaruh dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid*. Tesis. Universitas Gunadarma.(dipublikasikan)
- Christiyanti, Maria Erdina. 2010. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Asimetri Informasi terhadap Timbulnya Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. Universitas Katolik Soegijapranata.(dipublikasikan)
- Dharma, Surya. 2008. *Penilaian Kinerja Kepala Sekolah*. Jakarta : Direktorat Tenaga Kependidikan

- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
- Diantimala, Yossi dan Jogyanto Hartono, 2001. Pengaruh Pengumuman Laba terhadap Asimetri Informasi. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi IV IAIKAPd: 35-52*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Ghozali, Imam, 2006, “ *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*”, Edisi 4, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Prof Dr Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasibuan, M.S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Tesis. Universitas Hasanuddin Makasar. (dipublikasikan)
- Herawaty, Netty. 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. Vol13. No2. Pp31-36. (dipublikasikan)
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba empat.
- Kartadinata, Sunaryo. 1997. *Pendidikan dan Pengembangan SDM Bermutu Memasuki Abad XXI*. Purwokerto: Makalah Konvensi.
- Leslie. 1992. *Keuangan Dan Akunting*. Diterjemahkan oleh Dra. Dyah Ratna Permatasari. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Mahsun, Mohamad, Firma S dan Heribertus. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.
- Mardiasmo. 2001. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mathis, Robert L dan John H. Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Milani, K. W. *The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study*, *The Accounting Review* (April 1975), pp. 274-284.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi kedua. Yogya: YPKN.
- Nafirin. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Prasetya, Gede Edy SE.M.M. 2005. *Penyusunan dan Analisis “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”*. Yogyakarta: Andi.
- Pratiwi, Ika Budi. 2012. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Budgeting Slack dengan Penekanan Anggaran dan Asimetri Informasi sebagai Pemoderasi*. Skripsi. Universitas Katolik Soegijapranata. (dipublikasikan)
- Putra, Deki. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja*

- Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.(dipublikasikan)
- Rasul, Syahrudin. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta : PNRI.
- Scott, William R, 2003. *Financial Accounting Theory*. Toronto: Prentice Hall International Inc.
- Sedarmayanti. 2009. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Setyadi, Didik. 2009. *Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah Terhadap Efektifitas Guru dalam Mengajar di Sekolah Dasar Negeri Gugus Banggu Kecamatan Tuntang*. Tesis. Universitas Kristen Satya Wacana.(dipublikasikan)
- Shim,Jae K dan Joel G Siegel. 2001. *Budgeting “Pedoman Lengkap Langkah-Langkah Penganggaran”*. Jakarta: Erlangga.
- Sundjaja, Ridwan s dan Inge Barlian. 2002. *Manajemen Keuangan Satu*. Jakarta: Prenhallindu.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPF.
- Yuwono, S, Indrajaya dan Hariyadi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia.